

Mantan PM Najib Razak Ingin Calonkan Diri Lagi ke Parlemen

KUALA LUMPUR(IM)

- Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak tidak mengesampingkan pencalonannya kembali ke parlemen dalam dua tahun ke depan. Dia yakin pencalonannya kelak tidak terpengaruh oleh skandal korupsi yang menyeretnya.

Berbicara kepada Reuters pada Sabtu (18/9) waktu setempat, Najib menentang diskualifikasinya untuk maju dalam bursa pencalonan perdana menteri. "Itu tergantung pada interpretasi," kata Najib.

"Itu tergantung interpretasi dari segi hukum, konstitusi dan apapun yang terjadi dalam proses pengadilan," ujarnya menambahkan. Ditanya apakah dia akan mengikuti pemilihan berikutnya yang dijadwalkan pada 2023, dia mengatakan, "Setiap politisi yang ingin memainkan peran akan menginginkan kursi di parlemen."

Partai Najib, United Malays National Organisation

(UMNO) meraih jabatan perdana menteri setelah digulingkan dari kekuasaan tiga tahun lalu karena skandal korupsi miliaran dolar AS. Para penentangannya mengkhawatirkan bahwa para pemimpin partai yang menghadapi dakwaan korupsi dapat memperoleh keringanan hukum setelah memegang kendali.

Najib menjabat perdana menteri selama sembilan tahun hingga 2018. Dia dinyatakan bersalah atas dakwaan korupsi tahun lalu dan dijatuhi 12 tahun penjara atas salah satu dari banyak kasus penyelewengan dana dari dana negara 1MDB yang sekarang sudah tidak berfungsi.

Namun dia terus membantah melakukan kesalahan dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Najib kini masih anggota parlemen tetapi konstitusi melarangnya mengikuti pemilihan umum kecuali dia mendapat pengampunan atau penangguhan hukum dari raja negara itu. ● gul



PEMILIHAN UMUM JERMAN

Pendukung berkumpul selama acara kampanye pemilihan oleh Menteri Keuangan Jerman, Wakil Rektor dan kandidat utama Partai Sosial Demokrat Olaf Scholz di Munich, Jerman, Sabtu (18/9).

Prancis Tuding AS Telah Berbohong

Prancis telah menarik dubesnya dari Canberra dan Washington.

PARIS(IM) - Prancis menuduh Australia dan Amerika Serikat (AS) berbohong atas pakta keamanan. Pakta keamanan tersebut membuat pemerintah Australia membatalkan kontrak untuk membeli kapal selam Prancis demi kapal AS.

"Telah terjadi kebohongan, duplikasi, pelanggaran besar terhadap kepercayaan dan penghinaan," kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, dilansir Aljazeera, Minggu (19/9).

Le Drian berbicara sehari setelah dia menarik dua besar Prancis untuk Canberra dan Washington. Penarikan itu atas perintah Presiden Emmanuel Macron. Hal ini adalah sebuah

tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Fakta bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan antara Amerika Serikat dan Prancis kami menarik dua besar kami untuk konsultasi adalah tindakan politik yang serius, yang menunjukkan besarnya krisis yang ada sekarang di antara negara kami," kata Le Drian.

Le Drian menggambarkan penarikan dua besar sebagai tindakan simbolis yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa Paris tidak sepakat dengan pakta keamanan tersebut. Le Drian mengatakan, ada krisis serius yang terjadi antara Prancis, Australia, dan AS. "Ada krisis serius di antara kami, dan kami akan men-

gevaluasi kembali posisi kami untuk membela kepentingan kami," kata Le Drian.

Le Drian juga mengeluarkan tanggapan pedas atas pertanyaan mengapa Prancis tidak menarik dua besarnya di Inggris, yang juga merupakan bagian dari pakta keamanan yang menyebabkan putusnya kontrak.

"Dengan Inggris tidak perlu. Kami tahu oportuniste konstan mereka. Posisi Inggris dalam semua hal ini seperti roda ketiga," kata Le Drian.

Pada 2016 Australia memilih produsen kapal Naval Group dari Prancis untuk membangun kapal selam senilai 40 miliar dolar AS. Kapal itu akan mengganti kapal selam Collins yang sudah berusia 20 tahun.

Kepsekapan terbaru Australia adalah kemunduran kedua bagi ekspor pertahanan Prancis dalam tiga bulan setelah Swiss menolak Rafale milik Dassault untuk membeli pesawat tempur Lockheed Martin F-35 buatan AS.

Lockheed Martin F-35 buatan AS.

Analisis menilai hilangnya kontrak kapal selam yang jauh lebih besar merupakan pukulan signifikan bagi Prancis. Prancis telah habis-habisan untuk merebut kesepakatan kapal selam dari kemungkinan pemenang Jepang di bawah menteri pertahanan saat itu Le Drian pada 2016.

Kemenangan 2016 datang satu dekade setelah Prancis secara radikal merombak cara menangani penjualan senjata menyusul rasa malu Paris atas kalahnya kontes menjual pesawat tempur ke Maroko.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, Prancis adalah sekutu penting dan AS akan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan. Sementara menyalskan penarikan dua besar Prancis dan menghargai hubungan dengan Prancis. Australia akan terus terlibat dengan Paris dalam masalah lain.

"Australia memahami kekecewaan mendalam Prancis atas keputusan kami, yang diambil sesuai dengan kepentingan keamanan nasional kami," kata juru bicara Menteri Luar Negeri Marise Payne.

Sementara itu, diplomat Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, pakta baru menunjukkan bahwa blok itu harus mengembangkan strategi pertahanan dan keamanannya sendiri, khususnya di Indo-Pasifik. Borrell mengatakan, dia tidak diajak berkonsultasi mengenai kesepakatan antara Canberra, London dan Washington. Uni Eropa merasa kecewa lantaran tak dilibatkan dalam kemirrahan baru yang dikenal sebagai AUKUS itu.

"Kita harus bertahan hidup sendiri, seperti yang dilakukan orang lain. Saya mengerti sejauh mana kekecewaan pemerintah Prancis," ujar Borell. Rizky Jaramaya. ● tom

PM Baru Lebanon Cari Perbaikan Cepat'Keluar dari Krisis Ekonomi

LEBANON(IM) - Perdana Menteri baru Lebanon, Najib Mikati mendesak rakyat untuk menaruh kepercayaan mereka pada pemerintahnya saat ia mencari perbaikan cepat untuk membantu negaranya yang hancur secara ekonomi.

Dalam wawancara pertamanya dengan outlet media internasional sejak membentuk pemerintahan seminggu yang lalu, Mikati mengakui bahwa beberapa orang Lebanon akan berjuang untuk menaruh kepercayaan mereka padanya dan pemerintahannya setelah begitu banyak politisi telah mengecewakan mereka di masa lalu.

Tetapi ini adalah waktunya untuk memiliki pemerintahan untuk mengambil keputusan dan mengakhiri kekosongan politik negara itu, sebelum pemilihan umum yang direncanakan pada Mei mendatang. "Saya melakukan perbaikan cepat, perbaikan cepat yang (perlu) dilakukan segera mungkin, terutama energi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan transparansi, dan menunjukkan kepada Lebanon bahwa ada pemerintahan. Ada transparansi. Itulah yang kami coba lakukan. Dan mudah-mudahan itu akan terlaksana," terangnya. Dia tidak menjelaskan bagaimana dia akan melakukan perbaikan ini.

Mikati, seorang miliarder yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri sementara pada 2005 dan 2011, mengpalai kabinet yang akan memimpin depresi ekonomi di Lebanon, yang oleh Bank Dunia dianggap sebagai salah satu yang terburuk di dunia sejak pertengahan abad ke-19.

Sementara wajah-wajah baru di pemerintahan, banyak yang dipilih sendiri oleh lembaga politik yang sama dan kelompok-kelompok yang dipersalahkan atas korupsi yang menyebabkan kehancuran ekonomi negara itu. Salah satu masalah ekonomi paling mendesak yang dihadapi pemerintah baru adalah program subsidi negara yang mahal.

Pada Jumat (17/9), pemerintah Lebanon menaikkan harga minyak lebih dari 37%, karena negara itu terus menghapus subsidi impor dalam upaya untuk menarik bantuan moneter internasional. Keputusan itu diperkirakan akan meningkatkan harga bagi rakyat Lebanon, yang sudah berjuang dengan tingkat kemiskinan yang melonjak.

Namun menurut Mikati, sekitar 74% dari subsidi senilai lebih

dari USD10 miliar (Rp143 triliun) disalahgunakan oleh para pedagang dan orang-orang korupsi di Lebanon selama setahun terakhir dan program itu tidak berkelanjutan.

"Subsidi hampir dicabut karena kami tidak memiliki uang tunai atau cadangan untuk mensubsidi minyak atau komoditas lainnya," terangnya kepada CNN. "Kami akan tetap memberikan subsidi untuk obat-obatan, tetapi subsidi untuk komoditas lain akan dicabut," ujarnya.

Mikati mengatakan mengakhiri subsidi merupakan langkah penting untuk memulai negosiasi dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan komunitas internasional. Bank Sentral Lebanon mengeluarkan pernyataan bulan lalu yang mengatakan bahwa subsidi bahan bakar dieksploitasi oleh bisnis. Sekitar USD800 juta (Rp11 triliun) telah dibayarkan untuk subsidi impor pada Juli lalu, namun kekurangan bahan bakar masih merajalela.

Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, meninjau penjaga kehormatan selama upacara di Gedung Pemerintah di pusat kota Beirut, Lebanon, pada 13 September 2021. Lebanon telah menghabiskan 13 bulan tanpa pemerintahan yang sepenuhnya terbentuk sejak mantan PM, Hassan Diab mengundurkan diri, setelah ledakan mematikan melanda pelabuhan Beirut tahun lalu.

Mikati mengatakan sekarang mereka membutuhkan dukungan dari dunia Arab. "Lebanon adalah negara kecil di dunia Arab, dan kami mencari saudara besar dari semua negara Arab untuk datang membantu kami, dan membawa Lebanon [keluar] dari kekacauan ini," terangnya.

"Lebanon yang stabil akan menguntungkan seluruh dunia Arab," lanjutnya.

"Hiszillah sebagai partai politik ada di Lebanon. Saya tidak bisa melewati partai ini," ungkapnya saat ditanya tentang kehadiran sekutu Hizbullah di pemerintahannya.

Negara-negara Arab belum memanggil Mikati sejak pembentukan pemerintahannya pekan lalu, namun dia tetap optimis bahwa dia akan menerima 'respons positif'. Dia juga menambahkan bahwa dia telah menerima telepon dari anggota pemerintahan AS dalam seminggu terakhir, yang semuanya mendukung pemerintahannya, tetapi Presiden AS, Joe Biden tidak menelponnya. ● gul

Konvoi Militer Myanmar di Yangon Diserang Bom

YANGON(IM) - Konvoi pasukan militer Myanmar di Khayan, pinggiran Yangon diserang bom. Serangan tersebut berujung pada baku tembak antar kelompok anti-junta dan militer hingga menyebabkan korban jiwa.

Seperti dilansir AFP, Minggu (19/9) sejak Februari lalu, Myanmar berada dalam kekacauan politik pasca junta menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu protes dan tindakan kekerasan oleh militer.

Sejumlah kotapraja di seluruh Myanmar membentuk kelompok yang disebut "pasukan pertahanan rakyat" untuk melawan balik melawan junta. Bertrok pun juga tak terelakkan terjadi di sejumlah daerah pedesaan.

Insiden serangan bom terjadi pada Jumat (17/9) lalu saat pasukan keamanan sedang melakukan perjalanan melalui Khayan, pinggiran pusat komersial Yangon. Dalam pernyataannya Sabtu (18/9) lalu, junta menyebut mereka seketika diserang dengan bom rakitan.

"Kedua kelompok itu saling menembak -- seorang anggota pasukan keamanan terluka," demikian pernyataan junta, seraya menambahkan bahwa pasca bertrokan mereka menyita sejumlah senjata api dan amunisi. "Beberapa teroris (terbunuh), salah satunya terluka," imbuhnya.

Media lokal melaporkan setidaknya dua pemberontak anti-junta tewas dan satu lainnya ditangkap.

Awal bulan ini "Pemerintah Persatuan Nasional" (NUG) yang sebagian besar terdiri dari anggota parlemen yang berafiliasi dengan partai Suu Kyi menyerukan "perang defensif rakyat" dan mendesak warga sipil untuk menargetkan aset aset militer di daerah junta.

Menara komunikasi milik perusahaan militer, Mytel, juga telah menjadi target penyerangan di seluruh Myanmar. Kini sudah 12 menara yang dihancurkan.

Konflik juga meningkat di wilayah Sagaing dan Magway, di mana penduduk setempat pekan ini menuduh militer membakar rumah dan memburu orang mengungsi.

"Militer telah menghancurkan wilayah kami karena pasukan perlawanan lokal," kata seorang wanita berusia 25 tahun dari kotapraja Gangaw Magway kepada AFP.

"Saya kehilangan beberapa teman saya. Saya patah hati karena saya telah menyaksikan semua kejahatan mereka dengan mata kepala sendiri," lanjutnya.

Penduduk kotapraja Gangaw lainnya mengatakan di salah satu desanya yang paling parah terdampak, Namg Kar, sejumlah rumah telah diratakan sejak 10 September lalu. Proses tersebut berhenti selama seminggu terakhir karena hujan monsun terus memadamkan api.

"Mereka mencoba membakar seluruh desa. Tapi saat itu musim hujan. Mereka takut pada tentara karena mereka bisa kembali kapan saja ke desa," kata warga tersebut, seraya menambahkan bahwa 4.000 warga Namg Kar telah mengungsi ke hutan terdekat. ● ans



ANAK-ANAK PEREMPUAN AFGHANISTAN

Anak-anak perempuan Afghanistan berbaris di sebuah sekolah di Kabul, Afghanistan, Sabtu (18/9).

Pemimpin Dunia Bahas Pandemi dan Iklim di Sidang Umum PBB

NEW YORK(IM) - Para pemimpin dunia akan kembali bertemu di PBB pekan ini memicarakan fokus pada peningkatan upaya memerangi perubahan iklim dan pandemi Covid-19. Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum (SMU) ke-76 PBB di gelar di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS) dalam format hibrida atau campuran kehadiran dan virtual.

Oleh karena pandemi Covid-19 masih mengaumit di tengah peluncuran vaksin yang tak merata, sekitar sepertiga dari 193 negara di PBB berencana kembali menyampaikan pidato secara pre-recorded. Namun presiden SMU yang baru, Menteri Luar Negeri Maladewa Abdulla Shahid, perdana menteri sebagai negara, dan menteri luar negeri negara-negara akan hadir di New York.

AS mencoba untuk mencegah para pemimpin datang ke New York dalam upaya mencegah acara ini menjadi pusat penyebaran virus. Vaksinasi menjadi persyaratan untuk masuk ke markas PBB. Namun syarat vaksin bisa saja luntur ketika negara pertama yang pidato di SMU adalah Brasil. Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyatakan, tidak memerlukan suntikan vaksin karena dia sudah kebal setelah terinfeksi Covid-19.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa diskusi seputar berapa banyak diplomat perjalanan yang mungkin telah divaksin menggambar betapa dramatisnya ketidaksetaraan saat ini dalam kaitannya dengan vaksinasi. Dia mendorong rencana global untuk memvaksinasi 70 persen populasi dunia pada paruh pertama tahun depan.

Dari 5,7 miliar dosis vaksin virus corona yang diberikan di seluruh dunia, hanya 2 persen

yang berada di Afrika. Presiden AS Joe Biden direncanakan akan berbicara secara langsung di SMU kali ini. Biden direncanakan akan berada di New York selama 24 jam bertemu dengan Guterres pada Senin (20/9), dan menyampaikan pidato pertama di PBB pada Selasa (21/9) setelah Bolsonaro.

Biden juga dijadwalkan akan menjadi tuan rumah pertemuan virtual dari Washington dengan para pemimpin dan kepala eksekutif pada Rabu yang bertujuan untuk meningkatkan distribusi vaksin secara global. Utusan PBB Linda Thomas-Greenfield, mengatakan Biden akan berbicara dengan prioritas utama AS yakni mengakhiri pandemi Covid-19, memerangi perubahan iklim dan membela hak asasi manusia, demokrasi, dan tanaman berbasis aturan internasional.

Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddy mengatakan, Indonesia akan menyampaikan isu utama soal pandemi yakni tantangan pandemi yang belum usai soal ketimpangan vaksinasi global. Isu lain yang bakal diangkat Indonesia yakni tentang menjaga ketertiban dunia dan perdamaian dunia melalui dialog dan solusi politik. Dalam hal ini, Indonesia akan mengangkat isu Palestina, Afghanistan dan Myanmar.

Di antara topik lain yang diharapkan akan dibahas oleh para menteri selama sepekan ini adalah Afghanistan dan Iran. Ketika para ilmuwan memperingatkan bahwa pemanasan global hampir tidak terkontrol, konferensi COP26 PBB bertujuan untuk memerangi perubahan iklim yang jauh lebih ambisius dan uang untuk ikut serta dan peserta di seluruh dunia. "Sudah waktunya untuk membaca bel alarm. Kami berada di ambang jurang maut," kata Guterres kepada Reuters pekan lalu. ● ans



PERAHU BERBENTUK BIOLA DI ITALIA

Kuartet gesek bermain di atas perahu berbentuk biola, berjudul "Biola Nuh", yang dibangun selama pandemi penyakit virus corona (COVID-19) oleh seniman Livio De Marchi bekerja sama dengan Consorzio Venezia Sviluppo dan didedikasikan untuk orang yang telah meninggal dari penyakit, di Venesia, Italia, Sabtu (18/9).

Menhan Belanda Mundur karena Masalah Pengungsi Afghanistan

ROTTERDAM(IM) -

Menteri Pertahanan Belanda Ank Bijleveld mengundurkan diri, karena masalah evakuasi pengungsi dari Afghanistan di tengah pengambilalihan Taliban. Bijleveld juga dikedem karena penundaan evakuasi warga sipil dari Afghanistan.

Bijleveld mengatakan, dia tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia akan mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Belanda Willem Alexander. Setelah perdebatan sengit pada Rabu, parlemen Belanda mengeluarkan mosi kecaman terhadap pemerintah atas penanganan evakuasi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sigrid Kaag juga mengundurkan diri setelah majelis rendah parlemen mengkritik

pemerintah atas penanganan evakuasi dari Afghanistan. Kaag mundur setelah parlemen memberikan suara untuk mengutuk pemerintah atas penanganan evakuasi tersebut. "DPR menganggap pemerintah telah bertindak tidak bertanggung jawab," kata Kaag, dilansir Anadolu Agency, Minggu (19/9).

Sebelum pemungutan suara di parlemen, Bijleveld telah mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk mengundurkan diri terlepas dari apapun hasilnya. Namun pada akhirnya, dia mengikuti jejak Kaag untuk mundur dari jajaran menteri. Bijleveld adalah anggota Christian Democratic Appeal (CDA). Dia menjabat sebagai menteri pertahanan pada 2017. ● gul